

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, ukuran pemerintah, dan opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Penelitian ini melibatkan 107 sampel pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2021. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Desentralisasi fiskal memiliki dampak negatif terhadap tingkat korupsi, dengan menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya, semakin rendah tingkat korupsi. Temuan ini mungkin disebabkan oleh prinsip-prinsip desentralisasi fiskal yang mendorong pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan demokrasi. Sehingga, kualitas pengendalian korupsi, efektivitas kinerja, regulasi, dan penerapan hukum di pemerintah daerah meningkat.

Ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat korupsi di dalamnya. Hasil ini mungkin disebabkan oleh campur tangan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, campur tangan yang berlebihan ini mungkin membuka peluang bagi anggota pemerintahan yang tidak jujur untuk melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran etika. Oleh karena itu, besarnya atau kecilnya ukuran pemerintah memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah.

Opini audit tidak memiliki pengaruh pada tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan, meskipun BPK RI memberikan opini audit yang baik untuk setiap pemerintah kabupaten/kota, tidak dapat dijamin bahwa tingkat korupsi di suatu kabupaten atau kota akan rendah.

V.2. Saran

V.2.1. Saran Teoritis

Harapannya, penelitian berikutnya dapat menginvestigasi tingkat korupsi di Indonesia dengan menggunakan data yang secara pasti menunjukkan bahwa kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun yang menjadi fokus penelitian, sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran yang akurat tentang tingkat korupsi pada periode yang bersangkutan. Diharapkan juga agar penelitian berikutnya dapat memasukkan faktor-faktor tambahan yang tidak tercakup dalam penelitian ini, seperti mempertimbangkan penggunaan variabel audit forensik.

V.2.2. Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berharap agar pemerintah pusat memperhatikan dan mengawasi dengan lebih seksama kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Perlunya peraturan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah-langkah baik secara pencegahan maupun penindakan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam pengelolaan sumber daya demi kepentingan masyarakat.

2. Bagi BPK RI

Penelitian ini berharap bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dapat menjalankan perannya sebagai auditor eksternal pemerintah secara efektif. Dengan keterlibatan optimal ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan yang efektif bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari terjadinya kasus korupsi. Dapat dilakukan dengan melakukan audit forensik dalam melakukan pemeriksaan guna mendeteksi kecurangan.